



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Jalan Raja Haji Fisabilillah Pasir Peta
e-mail : inspektorateanambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan. Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Kepulauan Anambas dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 Ayat 3, bahwa Rencana kerja PD dibuat sesuai dengan pokok dan fungsi serta mengacu pada RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dengan telah tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja PD ini, dapat dilihat sejauh mana Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Tarempa, 07 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH,



YUNIZAR, SE., M.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	26
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2024.....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas s/d Tahun 2025	14
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Renstra	23
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas	24
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026	28
Tabel 2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 ...	40
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Renstra	44
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Konsepsi Perencanaan Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang memuat kerangka Program/Kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun Tema Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 adalah ***“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”***. Dengan prioritas pembangunan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 4
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 5 Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53).
21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

22. Surat Wakil Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 07 Tahun 2025 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2026. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini telah disusun selaras dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yaitu:

1. Sebagai pedoman atau dasar penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai dasar suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai bahan evaluasi program/kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta
4. Sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mudah melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dari target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai Renstra yang telah ditetapkan, untuk dapat mengetahui program/kegiatan dan sub kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Berdasarkan Lampiran I Surat Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : **B/000.7.2.4/99.a/SETDA/SD/2/2025 tanggal 27 Februari 2025** tentang Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di alokasikan sebesar **Rp. 12.587.304.556 (Dua belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah**

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 terdiri dari 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yaitu terdiri dari :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;

2. Pendampingan Dan Asistensi

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan capaian rencana strategi (Renstra) Inspektorat Daerah yang dapat tercapai, dengan pagu anggaran APBD murni sebesar Rp. 13.628.867.075,- Adapun realisasi anggaran keuangan pada Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 79,10%, sedangkan realisasi fisik mencapai 80,52 % sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun Anggaran 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran			SISA ANGGARAN
			Realisasi Anggaran	% Keuangan	FISIK (%)	
1	2	3	7	9	11	
INSPEKTORAT DAERAH		13.628.867.075,00	10.780.781.318,00	79,10	80,52	2.848.085.757
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		11.408.571.056,00	9.619.059.833,00			1.789.511.223
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		64.464.100,00	39.093.000,00			25.371.100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.474.100,00	38.837.000,00	0,28	0,29	23.637.100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00	256.000,00	0,00	0,00	1.734.000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		8.637.114.028,00	7.555.159.541,00			1.081.954.487

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran			
			Realisasi Anggaran	% Keuangan	FISIK (%)	SISA ANGGARAN
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.460.035.028,00	7.437.667.541,00	54,57	54,91	1.022.367.487
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.480.000	92.050.000	0,68	0,87	49.430.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.599.000	25.442.000	0,19	0,19	10.157.000
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		16.428.000,00	9.583.000,00			6.845.000
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.428.000,00	9.583.000,00	0,07	0,08	6.845.000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		455.449.900,00	229.268.501,00			226.181.399
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.449.900,00	62.241.800,00	0,46	0,46	8.208.100
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	385.000.000,00	167.026.701,00	1,23	1,30	217.973.299
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		683.370.899,00	380.155.164,00			303.215.735
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	287.000,00	0,00	0,00	2.213.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.411.048,00	52.754.700,00	0,39	0,50	99.656.348
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.870.375,00	3.450.800,00	0,03	0,03	419.575
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	3.988.826,00	0,03	0,04	5.011.174
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.011.095,00	23.363.145,00	0,17	0,19	18.647.950
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.655.000,00	27.001.500,00	0,20	0,21	13.653.500
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432.923.381,00	269.309.193,00	1,98	2,00	163.614.188
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		106.152.000,00	106.120.000,00			32.000
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	106.152.000,00	106.120.000,00	0,78	0,78	32.000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.149.434.037,00	1.027.853.228,00			121.580.809
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	1.370.000,00	0,01	0,01	830.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000,00	-	0,00	0,00	3.500.000
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.197.484,00	4.148.000,00	0,03	0,03	49.484

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran			
			Realisasi Anggaran	% Keuangan	FISIK (%)	SISA ANGGARAN
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.139.536.553,00	1.022.335.228,00	7,50	7,66	117.201.325
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		296.158.092,00	271.827.399,00			24.330.693
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.500.000,00	93.500,00	0,00	0,00	9.406.500
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	44.458.250,00	0,33	0,34	14.541.750
23	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.658.092,00	227.275.649,00	1,67	1,67	382.443
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.355.362.018,00	638.593.818,00			716.768.200
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		1.127.203.609,00	584.309.609,00			542.894.000
24	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63.056.500,00	32.113.249,00	0,24	0,27	30.943.251
25	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	222.065.340,00	89.418.100,00	0,66	0,72	132.647.240
26	Reviu Laporan Kinerja	77.250.000,00	50.209.000,00	0,37	0,38	27.041.000
27	Reviu Laporan Keuangan	112.424.078,00	111.903.160,00	0,82	0,82	520.918
28	Pengawasan Desa	205.000.000,00	109.187.200,00	0,80	0,81	95.812.800
29	Kerjasama Pengawasan Internal	218.890.691,00	39.341.100,00	0,29	0,35	179.549.591
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	228.517.000,00	152.137.800,00	1,12	1,23	76.379.200
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		228.158.409,00	54.284.209,00			173.874.200
31	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	0,00	0,00	-
32	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	228.158.409,00	54.284.209,00	0,40	0,45	173.874.200
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		864.934.001,00	523.127.667,00			341.806.334
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		20.638.322,00	13.522.900,00			7.115.422
33	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.638.322,00	13.522.900,00	0,10	0,10	7.115.422

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran			SISA ANGGARAN
			Realisasi Anggaran	% Keuangan	FISIK (%)	
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		844.295.679,00	509.604.767,00			334.690.912
34	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.554.118,00	88.697.315,00	0,65	0,61	30.856.803
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96.364.260,00	59.953.500,00	0,44	0,45	36.410.760
36	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	573.109.610,00	346.133.952,00	2,54	2,58	226.975.658
37	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55.267.691,00	14.820.000,00	0,11	0,14	40.447.691
JUMLAH		13.628.867.075,00	10.780.781.318,00	79,10	80,52	2.848.085.757

Faktor yang menyebabkan realisasi keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan seluruh anggaran yang tidak bisa dicairkan Silpa Anggaran terjadi diakibatkan tidak tersedianya dana di Kas Daerah sehingga tidak dapat mengajukan pencairan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang berakibat kepada beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana dengan maksimal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Implikasi (hasil akhir/kesimpulan) yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluruh Program dan Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
								Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6				Usuran Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	01			Inspektorat Daerah Daerah									
6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%		
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 (36 Dok)		66,67% (24 Dok)	83.33% (30 Dok)	100%	83.33% (30 Dok)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01 01 2.01 01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok		6 Dok	8 Dok		10 dok	
6	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00						
6	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	41 Orang	45 Orang			50 Orang	
6	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dok	15 Dok	20 Dok			25 Dok	
6	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	3 Lap	4 Lap			5 Lap	
6	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	3 Lap	4 Lap			5 Lap		
6	01	01	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00							
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	3 Dok	4 Dok			5 Dok		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	78 Orang	104 Orang			130 Orang		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00							
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	5 Paket			6 Paket		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	5 Paket			6 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026					
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	5 Paket			6 Paket		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	5 Paket			6 Paket		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	5 Paket			6 Paket		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	3 Lap	4 Lap			5 Lap		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	3 Lap	4 Lap			5 Lap		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00		60%			80,00		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket	11 Paket	12 Paket			13 Paket		
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	17 Unit	18 Unit			19 Unit		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Penyediaan	100,00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	36 Lap	36 Lap		60 Lap		
6	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	36 Lap	36 Lap		60 Lap		
6	01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Lap	36 Lap	36 Lap		60 Lap		
6	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	36 Lap	36 Lap		60 Lap		
6	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100						
6	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	17 Unit	20 Unit		22 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
6	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 gedung	3 Unit	0		4 Gedung		
6	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
6	01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100% (31 OPD)	51,62% (16 OPD)	67,75% (21 OPD)				
6	01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Lap	42 Lap	63 Lap		63 Lap		
6	01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Lap	21 Lap	23 Lap		23 Lap		
6	01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Lap	18 Lap	24 Lap		24 Lap		
6	01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Lap	3 Lap	4 Lap		4 Lap		
6	01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	22 Lap	18 Lap	20 Lap		20 Lap		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Desa								
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawas Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	2 Lap	3 Lap			3 Lap		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dok	12 Dok	16 Dok			16 Dok		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00							
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	4 Lap	3 Lap			3 Lap		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Persentase (%) Perangkat Daerah yang Sudah di Nilai SPIP	100,00	41,94% (13 OPD)	61,29% (19 OPD)			80,65% (25 OPD)		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 PD	43 PD	63 PD			83 PD		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 PD	20 PD	40 PD			60 PD		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi	100,00	60,00	80,00			100,00		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98 PD	58 PD	78 PD			83 PD		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99 PD	62 PD	83 PD			64 LHP		
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80 LHP	48 LHP	64 LHP			28 PD		
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi	35 PD	21 PD	28 PD			28 PD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Integritas	dan Verifikasi Penegakan Integritas								

Catatan: Untuk Target Renja dan Realisasi Renja Tahun 2020 tidak kita tampilkan karena masih memakai Permendagri 13 Tahun 2006, sedangkan untuk Program dan Kegiatan 2021 menggunakan Permandagri 90 Tahun 2019

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2025	2023	2025	2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
			Tingkat Kualitas Pengawasan	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Lalu		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025 (Tahun n-2)	2026 (Tahun n-1)	2027 (Tahun n)	2028 (Tahun n+1)	2029 (Tahun n+2)	2025 (Tahun n-2)	2026 (Tahun n-1)	2027(Tahun n n)	2028 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	-	-	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%	66,17%	63,80%	66,00%	66,00%	
3	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	-	-	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	86,67%	83,80%	90,00%	90,00%	
4	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	
5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah Daerah	-	-	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)	B (64,29)	B (64,29)	BB (80,00)	BB (80,00)	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	-	-	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	BB (78,02)	BB (78,02)	AA (86,00)	AA (86,00)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran yaitu :

a. Faktor Pendorong

- Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2019, sehingga diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen bersama pemangku kepentingan dalam bersama-sama mendukung peningkatan Kabupaten Anambas untuk lebih baik dalam segala bidang;
- Dukungan alokasi anggaran yang baik dan layak merupakan salah satu faktor yang mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah mulai dilaksanakan dengan baik, dan
- Adanya SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Objek lainnya yang diperiksa;
- Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mengoptimalkan SAKIP;
- Masih terdapat Pemerintah Desa yang lambat dan tidak mengerti dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan, dan terdapat perangkat desa yang belum bisa untuk menyelesaikan rekomendasi temuan atas pimpinan perangkat desa sebelumnya;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, dan
- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas & Kinerja Inspektorat Daerah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat terlepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang dapat dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diuraikan pada program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Inspektorat Daerah membuka ruangan dan *Help Desk* untuk konsultasi dalam pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan berpengalaman pada Bidang yang dimiliki.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah masih kurangnya tenaga terampil dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan (PNSD/ASN), serta fasilitas pendukung lainnya antara lain alat bantu dalam bekerja dan sarana prasarana gedung kantor yang kurang kondusif dalam bekerja.

Hampir semua program kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan Auditor Perempuan dan Auditor Laki-laki karena perlakuan dalam melaksanakan tugas dipandang sama dalam penugasan, sebagian penugasan yang di tugaskan dan/atau diperintahkan di Ketua oleh Auditor Perempuan maupun sebaliknya, Inspektorat Daerah tidak ada membedakan persamaan gender dalam bekerja.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat diikutsertakan pada setiap Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi yang dipegang di luar maupun di dalam Daerah, agar menambah wawasan dan pengetahuan, disamping berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam diri sendiri.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	3	4	8	9	10				15	16	
	INSPEKTORAT DAERAH			12.587.304.55 6,00		INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.55 6,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.587.304.55 6,00		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.587.304.55 6,00	
	INSPEKTORAT DAERAH			12.587.304.55 6,00		INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.55 6,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	10.062.661.54 7,48		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.062.661.54 7,48	
1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.305.000,00					-	49.305.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	49.305.000,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	49.305.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.716.401.754, 78					-	8.716.401.754, 78	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	8.534.481.754,78	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	8.534.481.754,78	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	142.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	25 Dokumen	142.920.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	39.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	39.000.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	37.428.000,00					-	37.428.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	37.428.000,00	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	37.428.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	325.566.000,0 0					-	325.566.000,0 0	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	52.200.000,00	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	52.200.000,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	273.366.000,00	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	130 Orang	273.366.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	411.611.911,0 6					-	411.611.911,0 6	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.950.437,00	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	2.950.437,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	70.770.539,06	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	70.770.539,06	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.598.419,00	Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulaua n Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	4.598.419,00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.061.776,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	5.061.776,00	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	37.376.740,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	37.376.740,00	
6	Fasilitasi Kunjungan TamU										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	5 Laporan	35.240.000,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	35.240.000,00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	255.614.000,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	255.614.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	174.775.205,5 4					-	174.775.205,5 4	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	103.891.480,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	13 Unit	103.891.480,00	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	70.883.725,54	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	10 Unit	70.883.725,54	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	185.082.368,00					-	185.082.368,00	
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	2.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	2.480.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	182.602.368,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua	1 Laporan	182.602.368,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
					Kel/Desa			Kel/Desa			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	162.491.308,1 0					-	162.491.308,1 0	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	8.160.240,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	16 Unit	8.160.240,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	34.730.000,00	Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulau an Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	19 Unit	34.730.000,00	
3	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	119.601.068,10	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	1 Unit	119.601.068,10	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	1.348.657.805,52					-	1.348.657.805,52	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	1.193.460.765,52					-	1.193.460.765,52	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	155.197.042,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	84 Laporan	155.197.042,00	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	116.397.782,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	116.397.782,00	
3	Reviu Laporan Kinerja										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	155.197.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	155.197.040,00	
4	Reviu Laporan Keuangan										
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	116.397.780,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	116.397.780,00	
5	Pengawasan Desa										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52 Laporan	232.795.561,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Laporan	232.795.561,00	
6	Kerja Sama Pengawasan Internal										
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	155.197.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	155.197.040,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	262.278.520,52	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	262.278.520,52	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	155.197.040,00					-	155.197.040,00	
1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	155.197.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	155.197.040,00	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	1.175.985.203,00					-	1.175.985.203,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	232.795.560,00					-	232.795.560,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 Rekomendasi	116.397.780,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	83 Rekomendasi	116.397.780,00	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 Rekomendasi	116.397.780,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	60 Rekomendasi	116.397.780,00	
2	Pendampingan dan Asistensi	-	-	943.189.643,00					-	943.189.643,00	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	232.795.561,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	232.795.561,00	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KE T
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target 2027	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	155.197.042,00	Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	155.197.042,00	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	400.000.000,00	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah	155.197.040,00	Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa			Kab. Kepulauan Anambas , Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	155.197.040,00	
				12.587.304.556						12.587.304.556	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) disamping sebagai respon usulan para pemangku kepentingan baik dari Legislatif, Eksekutif, Kelompok Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat haruslah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya disampaikan kembali kepada OPD yang terkait terhadap Program dan Kegiatan dimaksud, untuk dimuatkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk dibahas kembali bersama Eksekutif dan Legislatif.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Kab. Kep. Anambas tahun 2026. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah melaksanakan Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai pengawasan, yaitu beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, PMRB dan lain sebagainya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Untuk mencapai visi “**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**” dan misi ke 3 (tiga) **Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi** Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya meningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajaman tugas, fungsi, dan tata kerja sehingga dapat memberi output dan outcome sebagaimana yang diharapkan serta tidak membedakan kesenjangan antara pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki dengan diperlakukan sama dalam lingkungan kerja sebagai pengawas.

Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat Daerah tentu harus memiliki :

1. Kewenangan
Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan
Karakteristik, potensi yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus dilakukan.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Ketersediaan sumber daya manusia didasarkan pada dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama ketersediaan tenaga yang professional dan menguasai tugas dan fungsi dari pengawasan.
4. Pengembangan Pola Kerja Sama
Pengembangan pola kerja sama didasarkan potensi lingkungan organisasi.
5. Ketersediaan Anggaran
Ketersediaan Anggaran yang memadai merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan baik lembaga maupun aparatur, mengingat banyaknya obyek yang akan dilakukan pemeriksaan dan pembinaan berada di luar Ibukota Kabupaten, karena selama keberadaan Inspektorat Daerah di tengah-tengah Perangkat Daerah, anggaran yang disediakan belumlah mencapai 1% (satu persen) dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
6. Pengarustamaan Gender (PUG)
Dalam mendukung program Nasional Pengarustamaan Gender (PUG) yaitu Program Perencanaan Refronsif Genger (PPRG) pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun Anggaran 2021 di implimentasikan kedalam program dan beberapa kegiatan secara langsung didalam praktek di lapangan sudah melaksanakan responsif gender dan/atau pengarustamaan gender dengan tidak membedakan kesenjangan antara pegawai laki-laki maupun pegawai perempuan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan menugaskan Auditor Perempuan untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksaan (Auditor) untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan di awal tahun. Program/Kegiatan yang di rumuskan dalam mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) yaitu pada program/kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Dengan memiliki 6 (enam) aspek tersebut diatas, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut diatas, dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan di bidang pengawasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengalokasikan anggaran pendidikan guna peningkatan kapabilitas dan/kemampuan auditor pengawas intern pemerintah (APIP), serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar auditor semangat dalam bekerja, serta sistem aplikasi pengawasan yang handal, serta anggaran yang sangat utama dan juga komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap profesionalisme pengawasan, yakni independensi, integritas dan kompetensi di bidang pengawasan. Permasalahan yang sering timbul di daerah dalam pengawasan adalah perbedaan persepsi antara Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) dengan Aparat Penegak Hukum tentang kewenangan penanganan atas kasus atau indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dan perlu adanya kesefahaman dalam bekerja dan pemisahan tugas dan fungsi dari beberapa pihak.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan;
 - b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

2. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
- c. Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Secara praktis dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2025	2023	2025	2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, berpedoman pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, merupakan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Kepulauan Anambas Priode 2021-2026, khususnya pada Misi ke 3 (tiga) yaitu Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi. Serta menselaraskan Program dan Kegiatan Nasional yang tertuang dalam SDGs (*Suistanable Development Goals*). Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerja Sama Pengawasan Internal;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Pada umumnya Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun Anggaran 2025 tidak mempunyai Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu. Program dan Kegiatan yang sudah terrencanakan dan akan dijabarkan pada Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kemudian dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Total Kebutuhan dana yang dibutuhkan sesuai pagu indikatif yang dirincikan menurut sumber pendanaan adalah sebesar Rp 18.042.000.000 (Delapan belas miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diperuntukkan dalam peningkatan sumber daya manusia dan menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pembinaan dan pengawasan. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Di mulai di tahun 1 (pertama) Tahun 2016 sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Khususnya Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Pemerintahan serta staf teknis pendukungnya. Karena tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya sebatas Pengawas (*watchdog*), melainkan pembinaan (*assistance*) dan penjamin mutu (*quality insurance*)

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	10.062.661.547,48			-	10.062.661.547,48
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	49.305.000,00			-	49.305.000,00
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	49.305.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		10 Dokumen	49.305.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	8.716.401.754,78			-	8.716.401.754,78
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	8.534.481.754,78	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		56 Orang/bulan	8.534.481.754,78
0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	25 Dokumen	142.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		25 Dokumen	142.920.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	39.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Laporan	39.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	37.428.000,00			-	37.428.000,00
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	37.428.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Laporan	37.428.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	325.566.000,00			-	325.566.000,00
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	52.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Dokumen	52.200.000,00
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	130 Orang	273.366.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		130 Orang	273.366.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	411.611.911,06			-	411.611.911,06
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	2.950.437,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		6 Paket	2.950.437,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	70.770.539,06	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		6 Paket	70.770.539,06
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	4.598.419,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		6 Paket	4.598.419,00
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan,	6 Paket	5.061.776,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/		6 Paket	5.061.776,00

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
			Semua Kel/Desa			APBD			
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	6 Paket	37.376.740,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		6 Paket	37.376.740,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	35.240.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Laporan	35.240.000,00
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	255.614.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Laporan	255.614.000,00

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	174.775.205,54			-	174.775.205,54
0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	13 Unit	103.891.480,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		13 Unit	103.891.480,00
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	10 Unit	70.883.725,54	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		10 Unit	70.883.725,54
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	185.082.368,00			-	185.082.368,00
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	2.480.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		60 Laporan	2.480.000,00

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	182.602.368,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		1 Laporan	182.602.368,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	162.491.308,10			-	162.491.308,10
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	16 Unit	8.160.240,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		16 Unit	8.160.240,00
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	19 Unit	34.730.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		19 Unit	34.730.000,00
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	1 Unit	119.601.068,10	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		1 Unit	119.601.068,10
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-		-	1.348.657.805,52			-	1.348.657.805,52
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-		-	1.193.460.765,52			-	1.193.460.765,52
0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	84 Laporan	155.197.042,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		84 Laporan	155.197.042,00

KOD E	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	116.397.782,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		25 Laporan	116.397.782,00
0003	Reviu Laporan Kinerja								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	155.197.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		30 Laporan	155.197.040,00
0004	Reviu Laporan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	116.397.780,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		5 Laporan	116.397.780,00
0005	Pengawasan Desa								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Laporan	232.795.561,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		52 Laporan	232.795.561,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	155.197.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		4 Kesepakatan	155.197.040,00
0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	262.278.520,52	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		20 Dokumen	262.278.520,52
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		-	155.197.040,00			-	155.197.040,00
0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	155.197.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		4 Laporan	155.197.040,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-		-	1.175.985.203,00			-	1.175.985.203,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-		-	232.795.560,00			-	232.795.560,00
0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	83 Rekomendasi	116.397.780,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		83 Rekomendasi	116.397.780,00
0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	60 Rekomendasi	116.397.780,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		60 Rekomendasi	116.397.780,00
	Pendampingan dan Asistensi	-		-	943.189.643,00			-	943.189.643,00
0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	232.795.561,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		34 perangkat daerah	232.795.561,00
0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	155.197.042,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		34 perangkat daerah	155.197.042,00
0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	400.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		1 Kegiatan	400.000.000,00
0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				12.587.304.556,00				12.587.304.556,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	34 perangkat daerah	155.197.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)/ APBD		34 perangkat daerah	155.197.040,00
					12.587.304.556,00				12.587.304.556,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2023. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil dan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya.

Dengan Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan eksistensi dan kapasitasnya dalam menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan perkembangan lingkungan dan masyarakat di daerah, terutama dalam memberikan dukungan yang maksimal guna pelaksanaan tugas dan fungsi

Tarempa, 07 Maret 2025

**INSPEKTUR DAERAH,**
YUNZAR, SE.,M.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009